

Kolom

Hal-hal yang Perlu Diketahui

di Balik Angka Kemiskinan BPS

Theresa Novalia - detikNews

<https://news.detik.com/kolom/d-4123080/hal-hal-yang-perlu-diketahui-di-balik-angka-kemiskinan-bps>

Kamis 19 Juli 2018, 14:48 WIB



Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/Infografis

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan pada 16 Juli 2018. Dinyatakan dalam rilis tersebut, pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingkat kemiskinan di bawah 10 persen ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Hal ini bagi sebagian orang adalah prestasi, namun tidak sedikit yang skeptis. Sebelum kita percaya maupun skeptis terhadap suatu data sangatlah perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana *sih* konsep dan metodologi BPS dalam menghitung angka kemiskinan tersebut? Melek konsep dan data sangat diperlukan agar kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang terperdaya oleh pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan angka statistik untuk kepentingan politik.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan secara konseptual dalam BPS dibedakan menjadi dua macam berdasarkan standar penilaiannya. Pertama, Kemiskinan Relatif. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal, serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan miskin secara relatif.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin.

Dengan demikian, ukuran kemiskinan sangat bergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dan antarwaktu, karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Kedua, Kemiskinan Absolut. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkalori/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Garis kemiskinan absolut nilainya tetap dalam hal standar hidup, sehingga garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti-kemiskinan antarwaktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil, dll).

BPS menggunakan konsep kemiskinan absolut ini melalui pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, maka dapat dihitung persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Konsep ini dipakai BPS sejak 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (*apple to apple*).

Metodologi Pengumpulan Data

Kemiskinan dihitung menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Sampel Susenas Maret mencakup 300.000 rumah tangga yang dipilih secara acak dan tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota di Indonesia. Kerangka sampel induk kegiatan Susenas sekitar 180.000 blok sensus yang ditarik secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan *size* rumah tangga Sensus Penduduk 2010 dari *master frame* blok sensus.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran. Pada paket komoditi kebutuhan dasar makan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Jadi, bisa dibayangkan berapa lama waktu yang diperlukan oleh petugas pengumpul data untuk mewawancarai responden Susenas ini. Rata-rata berdasarkan pengalaman petugas diperlukan waktu 2-3 jam untuk menanyakan kepada para responden pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di kuesioner.

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan dokumen Susenas ini terdiri dari kegiatan *receiving-batching*, *editing-coding*, *entry*, kompilasi data, dan tabulasi. Kegiatan *receiving-batching*, *editing-coding*, dan *entry* dilakukan sepenuhnya di BPS Kabupaten/Kota. Selanjutnya, kegiatan kompilasi data dan tabulasi dilakukan di BPS Provinsi dan Pusat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Selain memahami konsep dan metodologi, kita pun semestinya memiliki pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2017-Maret 2018 yang termuat dalam Berita Resmi Statistik antara lain adalah sebagai berikut:

1. Selama periode September 2017-Maret 2018 terjadi inflasi umum sebesar 1,92 persen.
2. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga yang berada di 40 persen lapisan terbawah selama periode September 2017-Maret 2018 tumbuh 3,06 persen.
3. Bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan I 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen.
4. Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal. Berdasarkan data Bulog, realisasi distribusi bantuan sosial Program Beras Sejahtera (Rastra) pada Januari 2018 sebesar 99,65 persen, pada Februari 2018 sebesar 99,66 persen, dan pada Maret 2018 sebesar 99,62 persen.
5. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2018 berada di atas angka 100, yaitu 101,94.
6. Kenaikan harga beras yang cukup tinggi, yaitu mencapai 8,57 persen pada periode September 2017-Maret 2018 disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan menjadi tidak secepat periode Maret 2017-September 2017. Pada periode Maret 2017-September 2017, harga beras relatif tidak berubah.

Kontribusi Kita Semua

Setelah membaca konsep kemiskinan hingga proses pengumpulan datanya, setidaknya kita memiliki bekal pengetahuan dalam menginterpretasikan data. Selebihnya, untuk menghasilkan data statistik kemiskinan yang terpercaya butuh kontribusi dari semua elemen masyarakat. Tidak hanya petugas yang berkualitas, dukungan dari masyarakat pun diperlukan agar terkumpul data yang representatif untuk menggambarkan konsumsi dan pengeluaran penduduk Indonesia yang akan mencerminkan tingkat kemiskinan pada akhirnya.

Theresa Novalia *Statistisi Pertama Badan Pusat Statistik*

(mmu/mmu)

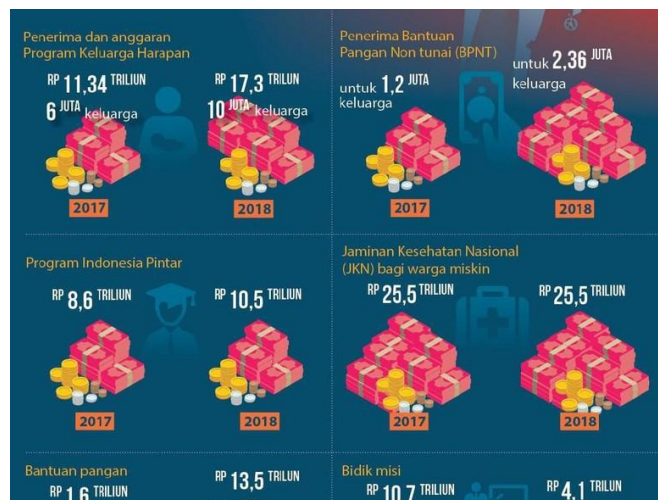
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? [Klik di sini](#) sekarang!

Kolom

Garis Kemiskinan Rp 400 Ribu Per Bulan, Tepatkah?

Udin Suchaini - detikNews

Kamis 19 Juli 2018, 14:07 WIB



Ilustrasi: Zaki Alfarabi/Infografis

Jakarta -

Pasca dirilisnya angka kemiskinan BPS (16/7/2018), pelbagai polemik muncul. Banyak netizen dan penggiat politik mengkritik, betapa kecilnya angka rupiah yang menjadi patokan batas miskin. Padahal, besaran rupiah saat ini telah meningkat jika dibandingkan garis kemiskinan sebelumnya.

Politisasi angka kemiskinan pun nyaris sempurna, tatkala angka sebesar 9,82% dianggap paling rendah sepanjang sejarah. Pertanyaan terkait metodologi, sampel yang digunakan, kondisi riil warga menjadi perbincangan hangat mendekati panas. Saling sindir antarpolitisi menjadi kemeriahan pesta demokrasi. Bahkan ada yang menuding, angka yang dikeluarkan BPS ini hanyalah trik dan *gimmick* rezim yang tengah berkuasa. Sebenarnya, bagaimana gambaran kemiskinan yang dipotret hingga saat ini?

Metode Pengukuran

Garis kemiskinan (GK) merupakan gambaran nilai rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan. Untuk menyelami gambaran batas kemiskinan, perlu diurai kebutuhan apa saja yang dikonsumsi penduduk dengan kemampuan menengah, dalam artian mereka yang belum kaya, tapi juga tidak miskin. Dari sini, rujukan bahan pokok yang menjadi kebutuhan warga dihitung harga komoditasnya.

Warga dengan kemampuan menengah dijadikan gambaran utuh, bagaimana penduduk Indonesia memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika yang dilihat adalah penduduk yang kaya, pasti akan banyak orang akan jatuh miskin. BPS menyebutnya sebagai populasi referensi.

Dari orang-orang menengah ini diukur nilai yang dapat dijadikan pembeda antara yang tidak miskin dan yang miskin. Penduduk yang tidak miskin pun masih diurai menjadi dua, ada yang hampir miskin dan ada pula yang memang kaya.

Mengukur angka kemiskinan ini pun bukan pukul rata untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemiskinan di Jakarta jelas memiliki preferensi yang berbeda dengan wilayah lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Di sisi lain pertimbangan konsumsi perkotaan dan pedesaan juga menjadi pembeda. Harga komoditas di masing-masing wilayah juga menjadi dasar menentukan, berapa rupiah pendapatan per bulan hingga seseorang dikatakan sebagai miskin. Sehingga, masing-masing provinsi memiliki garis kemiskinan masing-masing.

Sebagai gambaran, jika saya tinggal di Jawa Barat kota punya batas garis kemiskinan Rp 368 ribu per bulan per orang. Jika satu rumah tangga memiliki 4 anggota keluarga, maka pendapatan minimum saya untuk dianggap miskin adalah Rp 1,4 juta. Angka ini sebagai gambaran kemampuan saya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, bukan memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Memenuhi kebutuhan pokok ini berbeda berapa besaran rupiahnya ketika kita tinggal di provinsi yang berbeda.

Secara umum kemiskinan Indonesia turun? Benar. Tapi, tidak terjadi di semua provinsi. Ada yang turun, ada pula yang naik. Sebagai contoh di Maluku Utara, kemiskinan naik dari 6,44 persen menjadi 6,64 persen; Sulawesi Barat dari 11,18 persen menjadi 11,25 persen. Namun, secara keseluruhan sebagian besar provinsi mengalami penurunan. Dampaknya, kemiskinan Indonesia pun turun.

Dalam mengukur kemiskinan, Indonesia dalam menghitung garis kemiskinan telah memenuhi standar internasional, menggunakan Purchasing Power Parity (PPP). Lebih lengkapnya bisa dilihat di *Introduction Poverty Analysis* rujukan World Bank. Di dalamnya dijelaskan berbagai metode hitung kemiskinan dan penghitungan dengan komoditi dasar yang memang diizinkan. Banyak negara lain yang juga mengadopsi metode ini. BPS menyebutnya dalam cakupan basket komoditi.

Batasan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar PPP 1 USD, saat ini meningkat menjadi 1,9 USD per hari. Jika ingin dilihat perbandingan internasional, tinggal di-convert saja. Tapi ingat, PPP adalah daya beli, bukan 1 USD kurs mata uang (Rp 14.000). Pada 2016, 1 USD PPP = Rp 4.985 (bukan Rp 13.000). Jadi diperoleh garis kemiskinan sebesar $1,9 \times 30 \times \text{Rp } 4.985 = \text{Rp } 284.145$. Garis kemiskinan versi internasional dari World Bank ini masih jauh di bawah garis kemiskinan Indonesia yang menjadi standar saat ini sebesar Rp 401.220 per orang. Jika kita menggunakan angka World Bank, kemiskinan di Indonesia jauh lebih kecil lagi dari angka 9,92 persen.

Gambaran kondisi riilnya, upah buruh tani pada 2017 per hari sebesar Rp 51.612, maka rata-rata dalam satu bulan bekerja tanpa libur --ingat, tanpa libur!-- hasilnya Rp 1.548.360. Jika anggota rumah tangganya sebanyak 4 orang, buruh tani ini masih dalam kategori miskin, karena batas kemiskinan untuk rumah tangga yang anggotanya 4 orang sebesar Rp 401.220 per bulan per orang dikali 4, yaitu Rp 1.604.880. Mungkin angka 400 ribu per bulan per orang ini masih sangat rendah, namun buruh tani masih mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan masuk dalam kategori miskin.

Siapakah Mereka?

Orang miskin biasanya nyaris terlewat dalam setiap kebijakan. Mereka pasti bekerja untuk memenuhi kebutuhan esok hari, akhirnya tidak terukur dalam pengangguran. Papua dengan penduduk miskin tinggi, penganggurannya cukup rendah. Sementara, Jakarta dengan pengangguran rendah, memiliki kemiskinan yang cukup tinggi. Penduduk miskin yang dicatat BPS telah sesuai dengan rujukan WHO dan FAO, merupakan penduduk yang belum mampu mencukupi kebutuhan hidup yang paling minimal. Ingat, paling minimal. Untuk makan besok, harus bekerja hari ini. Begitulah kira-kira.

Orang miskin biasanya menjadi buruh tani untuk kasus pedesaan, serta buruh bangunan untuk daerah perkotaan. Pemerintah telah mencoba menyentuhnya, mulai dari PKH hingga Dana Desa. Tujuannya jelas, menyentuh penduduk dalam batas garis kemiskinan ini. Proyek-proyek program dana tunai untuk pekerja desa melalui pembangunan infrastruktur desa juga menjadi langkah.

Namun, kondisi yang patut diwaspadai adalah gini rasio pedesaan meningkat 0,04 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan gini rasio ditengarai disebabkan oleh padat karya yang tengah berjalan. Pelaksananya bukanlah penduduk miskin dan juga bukan pengangguran, namun lebih banyak penduduk yang setengah menganggur. Dampaknya, penduduk setengah menganggur pedesaan berkurang signifikan, sebesar 4,25 persen dari 2015 hingga Agustus 2017.

Akhirnya, angka kemiskinan memang menjadi dasar ukuran keberhasilan pengambilan kebijakan, namun bukan berarti mutlak tidak ada masalah dalam pemerataan. Keberhasilan menyentuh sebagian warga miskin harus diperbaiki dalam tingkat pelaksanaan. Kembali lagi, tepat atau tidaknya ukuran ini dari apa yang rata-rata masyarakat Indonesia rasakan, bukan standar hidup ukuran kita yang saat ini mampu menggenggam *smartphone*, serta sanggup beli kuota untuk mengakses internet membaca tulisan ini. Semoga mencerahkan.

Udin Suchaini *Analisis Data di Badan Pusat Statistik dan saat ini berkecimpung dalam*

Pendataan Potensi Desa (Podes)

(mmu/mmu)

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? [Klik di sini](#) sekarang!

[angka kemiskinan](#)